

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Moderasi di Jawa Tengah

Afa Nisa Maulani^{1✉}, ²Rusdarti, ³Agus Wahyudin

^{1,2,3}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/beaj.v3i2.46387>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, pengaruh investasi terhadap kemiskinan, pengaruh belanja public terhadap kemiskinan serta menganalisis indeks pembangunan manusia (IPM) dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja publik terhadap kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan model regresi dan MRA. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data kemiskinan, PDRB, data investasi, data laporan keuangan dan data IPM tahun 2016-2020 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Belanja public pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Belanja public kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mampu memoderasi pengaruh investasi terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlemah pengaruh belanja public pendidikan terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mampu memoderasi pengaruh belanja public kesehatan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, PDRB, Investasi, Belanja Publik, IPM

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, pada awalnya hanya merupakan persoalan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat atau krisis moneter (krismon) karena dipicu oleh jatuhnya mata uang Thailand, Bath. Krisis ini menjadi pencetus krisis-krisis yang lain, krisis moneter berubah menjadi krisis total yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Dampak krisis global selama ini membawa angka kemiskinan kembali meningkat di Indonesia, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyarakat tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasilitas mendasar, seperti fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya (Rusdarti & Lesta, 2013).

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah lintas zaman, kenyataan ini kiranya menjadi latar belakang mengapa kemiskinan menjadi masalah yang mendapat perhatian besar (Wijayanto & Sucihatiningsih, 2019). Hal ini menjadi masalah penting bagi semua negara terutama negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan ditandai oleh berbagai hal yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, rendahnya mutu layanan kesehatan dan pendidikan serta rendahnya kualitas hidup penduduk. Menurut data BPS (2020), Indonesia memiliki 16 wilayah yang berada di atas angka kemiskinan nasional yaitu 10,19% sedangkan Provinsi Jawa tengah menempati posisi ke-13 yang memiliki penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan

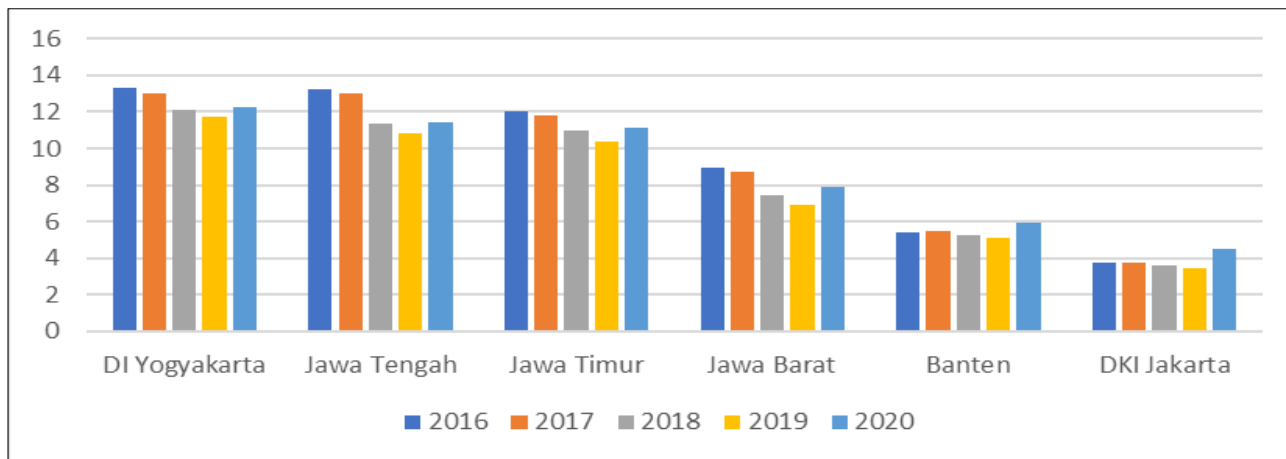
dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS, 2021).

Tingkat kemiskinan di setiap Provinsi di Indonesia memiliki persentase yang berbeda. Berdasarkan data BPS (2021), apabila dibandingkan dengan enam Provinsi di Pulau Jawa yaitu seperti Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi. Dengan rata-rata angka kemiskinan 11,96%, hal ini dikatakan tergolong tinggi karena di atas angka (>10%) yang mengindikasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih belum optimal (Andrietya *et al.*, 2020). Berikut grafik 1 persentase kemiskinan enam Provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2016-2020.

Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Saputra (2011), salah satu faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai syarat penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Fauzel *et.al.*, 2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu syarat keharusan atau penting (*necessary condition*) dalam upaya mengurangi

kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) mengharuskan pertumbuhan ekonomi untuk lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya,

pertumbuhan ekonomi harus menyebar di setiap lapisan masyarakat baik dari golongan pendapatan, termasuk ke golongan penduduk miskin (*growth with equity*) (Tambunan, 2001).



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa Periode 2016-2020 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021 (data diolah)

Investasi merupakan faktor yang paling penting guna mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan wilayah (Suharlina, 2020). Tirta (2013) berpendapat bahwa investasi merupakan input suatu kegiatan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja.

Investasi disalurkan untuk peningkatan pembangunan manusia khususnya kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja (Sackey & Richard, 2021). Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Ocaya, Ruranga & Kaberuka, 2012).

Selain itu, tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan investasi, kemiskinan juga dipengaruhi oleh belanja publik. Menurut Putri (2019) permasalahan pembangunan yang terjadi menuntut adanya campur tangan dari pemerintah yang diharapkan akan mengatasi kemiskinan. Menurut Rusdarti dan Lesta (2013) diharapkan

dengan otonomi daerah maka upaya percepatan pembangunan ekonomi atas dasar inisiatif lokal dapat diwujudkan guna mengatasi masalah pembangunan di daerah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja publik terhadap kemiskinan, serta menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja publik terhadap kemiskinan. Orisinalitas dalam penelitian ini menghadirkan variabel IPM sebagai variabel moderasi untuk memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja publik terhadap kemiskinan.

Penelitian ini berlandaskan pada teori lingkaran setan kemiskinan atau (*viciouscircle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953) mengatakan bahwa, suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. Teori ini mengandaikan suatu hubungan melingkar dari sumberdaya yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lain

secara sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Inti Menurut pandangan Nurkse (1953), terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat. Pertama dari segi penawaran modal dan kedua dari segi permintaan modal.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Metode dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan sumber data diperoleh dari BPS, DJPK dan Badan Penanaman Modal Daerah. Data yang diperoleh yaitu jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2020, data PDRB atas harga konstan tahun 2000 periode 2016-2020, data investasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2020, data keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2020 dan data IPM disetiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2020.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Berdasarkan observasi data yang dilakukan dan simulasi terhadap hasil regresi maka diputuskan model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 |X_1 - Z| + \beta_6 |X_2 - Z| + \beta_7 |X_3 - Z| + \beta_8 |X_4 - Z| + e \quad (1)$$

Dimana Y adalah variabel kemiskinan; α adalah konstanta (intersep); $\beta_1 - \beta_8$ adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen; X_1 adalah variabel pertumbuhan

ekonomi; X_2 adalah variabel investasi; X_3 adalah belanja publik pendidikan; X_4 adalah belanja publik kesehatan; Z adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM); $|X_1 - Z|$ adalah interaksi antara variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM; $|X_2 - Z|$ adalah interaksi antara variabel investasi dan IPM; $|X_3 - Z|$ adalah interaksi antara variabel belanja publik pendidikan dan IPM; $|X_4 - Z|$ adalah interaksi antara variabel belanja publik kesehatan dan IPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan belanja publik terhadap kemiskinan dengan IPM sebagai variabel moderasi yang dilakukan dengan perhitungan regresi linier berganda diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$KEM = 0,132 - 0,196ZPE - 0,182ZINV + 0,604ZBPPen - 0,335ZBPKes - 0,383AbsM1 - 0,187AbsM2 + 0,439AbsM3 - 0,092AbsM4 + e \quad (2)$$

Hasil pengujian regresi linier berganda didapatkan nilai konstanta sebesar 0,132, hal tersebut berarti bahwa apabila variabel pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja publik dan interaksi variabel moderasi dianggap konstan atau nol, maka nilai kemiskinan meningkat sebesar 0,132.

Berdasarkan hasil uji-t bahwa variabel pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan nilai *coefficient* sebesar -0,196 dan dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,026. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pertumbuhan ekonomi (ZPE) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan (KEM) sebesar 0,196.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Didu dan Ferri (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian juga diperkuat oleh Elviera dan Dedi (2020), Fadila dan Marwan (2020), Istifaiyah (2015). Sedangkan hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Chisti (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sejalan dengan hasil penelitian Andykha et.al (2018).

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah kemiskinan berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2011). Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Perekonomian yang berkembang akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih layak bagi masyarakat sekaligus menjadi prioritas penting dari kebijakan ekonomi makro. Kenaikan PDRB akan mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah disebabkan terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan.

Berdasarkan hasil uji-t bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan nilai *coefficient* sebesar -0,182 dan dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,021. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pertumbuhan ekonomi (ZINV) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan

menurunkan tingkat kemiskinan (KEM) sebesar 0,182.

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arshanti (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Ratih et.al. (2017), Andrietya (2020), Pateda et.al. (2018). Sementara hasil penelitian tidak sejalan dilakukan oleh Agustini dan Erni (2017) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Ocaya, Ruranga & Kaberuka, 2012). Hal ini dikaitkan dengan pendapat Sukirno (2000) yang menyatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan realisasi investasi akan memberikan respon pada tingkat kemiskinan berupa penurunan angka penduduk miskin. Respon ini dikarenakan semakin tinggi jumlah investasi yang ditanamkan maka sumber modal untuk menambah kapasitas produksi dan pendapatan di masa mendatang pun meningkat. Jika masyarakat memiliki pendapatan yang meningkat maka masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan akan berkurang.

Berdasarkan hasil uji-t bahwa variabel belanja publik pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan nilai *coefficient* sebesar 0,604 dan dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,001. Hal ini diartikan bahwa setiap variabel belanja pulik pendidikan (ZBPPen) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan

meningkatkan pula tingkat kemiskinan (KEM) sebesar 0,604.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian juga diperkuat oleh Ratih et.al. (2017), Palenewen, Een & Jacline (2018). Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresya et.al. (2015) yang menyatakan bahwa variabel belanja publik pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Birowo (2011), Sourya, Sainasinh, dan Onphanhdala (2014).

Nampaknya peningkatan biaya belanja sektor pendidikan belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan, hal tersebut karena tidak semua masyarakat terutama masyarakat miskin dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Ketidakmerataan ini mengakibatkan minimnya pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Daerah dengan tingkat kesenjangan pendidikan secara konsisten menunjukkan tingkat efisiensi produksi yang rendah, rendahnya tingkat inovasi dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (*World Bank*, 2002).

Berdasarkan hasil uji-t bahwa variabel belanja publik kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan nilai *coefficient* sebesar -0,335 dan dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,013. Hal ini diartikan bahwa setiap variabel belanja publik pendidikan (ZBPKes) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan (KEM) sebesar 0,335.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awe (2013) yang

menyatakan bahwa variabel belanja publik kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tresya et.al. (2015), Pratama dan Made (2019), Ratih et.al. (2017), Ketaren (2018). Berbeda dengan penelitian dari Isman (2020) yang mengemukakan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut juga didukung oleh Fithri dan David (2017).

Peningkatan belanja publik sektor kesehatan mampu meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dan juga membawa sumber daya manusia lebih produktif. Individu yang memiliki mental dan fisik yang sehat akan lebih bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya, mereka juga memiliki kemampuan belajar yang lebih baik hingga tumbuh menjadi individu yang terdidik. Becker dalam Saputri (2014) mengemukakan salah satu cara untuk berinvestasi dalam *human capital* yaitu meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Peningkatan anggaran alokasi pada sarana dan prasarana kesehatan yang merata, terjangkau dan memadai akan mempermudah masyarakat golongan miskin memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga mereka yang sehat mampu berproduktivitas dengan maksimal dan memperbesar pendapatan mereka untuk memperbaiki taraf kehidupan yang layak atau hidup di atas garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil dari uji moderasi menunjukkan bahwa peran variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dengan didukung adanya IPM yang tinggi pula, maka tingkat kemiskinan akan

mengalami penurunan. Hal tersebut karena sumber daya manusia yang berkualitas dianggap penting dalam membantu percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan perekonomian daerah. Semakin baik kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan (Bappenas, 2015). Individu yang memiliki keterampilan, skill, pengetahuan wawasan dan keahlian tenaga kerja akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya produktivitas kerja maka akan diimbangi dengan peningkatan pendapatan sehingga akan berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi yang artinya kemiskinan juga akan berkurang.

Berdasarkan hasil dari uji moderasi menunjukkan bahwa peran variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada investasi tidak mampu memoderasi pengaruh investasi terhadap kemiskinan. Realisasi investasi yang tinggi baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun investasi dari luar negeri, dengan didukung nilai IPM yang tinggi pula, maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan. Hal ini karena pentingnya peranan pembangunan manusia dalam investasi guna meningkatkan kualitas modal manusia, maka akan meningkatkan *skill* masyarakat hingga mampu bersaing dan masuk kelapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan. Anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan modal manusia tidak serta merta dapat dirasakan hasilnya dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemerintah

harus menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan layak agar masyarakat miskin mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jika tidak maka setinggi apapun pembangunan manusia tidak akan ada pengaruh apapun dalam mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil dari uji moderasi menunjukkan bahwa peran variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada belanja publik pendidikan tidak mampu memoderasi pengaruh belanja publik pendidikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan nampaknya belum mampu meningkatkan kualitas mutu modal manusia yang diwujudkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang melanda masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidakmerataan masyarakat miskin dalam mengenyam pendidikan yang mengakibatkan mereka tidak memiliki skill, keterampilan, keahlian tenaga kerjadan wawasan yang dapat menunjang dalam bersaing mencari pekerjaan maupun meningkatkan produktivitas kerja. Daerah dengan tingkat kesenjangan pendidikan secara nyata menunjukkan tingkat produktivitas yang rendah yang akan berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan tidak akan berkurang.

Berdasarkan hasil dari uji moderasi menunjukkan bahwa peran variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada belanja publik kesehatan tidak mampu memoderasi pengaruh belanja publik kesehatan terhadap kemiskinan. Peningkatan anggaran pada sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terjangkau akan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan kondisi yang sehat maka

dapat menjalankan kegiatan dan berproduktivitas dengan maksimal. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan berdampak pada besarnya pendapatan yang diperoleh dan memungkinkan mereka untuk terlepas dari lingkaran kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan teoritis empiris dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar $-0,196$ pengaruhnya negatif dan signifikan; (2) Pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar $-0,182$ pengaruhnya negatif dan signifikan; (3) Pengaruh belanja publik pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar $0,604$ pengaruhnya positif dan signifikan; (4) Pengaruh belanja publik kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar $-0,335$ pengaruhnya negatif dan signifikan; (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah; (6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mampu memoderasi pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah; (7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlemah pengaruh belanja publik pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah; (8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mampu memoderasi pengaruh belanja publik kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Yetty & Erni Panca Kurniasih. (2017). "Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 6, No. 2, 97-119.
- Andykha, Ridho., Herniwati Retno Handayani & Nenik Woyanti. (2019). *Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 33 No 2: 113-123.
- Andrietya, Achyamis Lilik., Amin Pujiati & Andryan Setyadharma. (2020). *Determinants of Poverty in Central Java Province 2013-2018*. *Journal of Economic Education*. 9(1): 81-88.
- Arshanti, Kadek Novita & I. G. A. P. Wirathi. (2015). *Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali*. *E-Jurnal EP Unud*, 4 [5]: 513-524.
- Awe, A. A.(2013). *Government Expenditure and Poverty Reduction in Ekiti State*. *Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 4, No. 5. www.translate.google.co.id
- Badan Pusat Statistika Indonesia. (2020). *Kemiskinan*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- Birowo, Tejo. (2011). *Relationship Between Government Expenditure And Poverty Rate In Indonesia, Comparison Of Budget Classifications Before And After Budget Management Reform In 2004, Japan*. www.translate.google.com

- Chisti, Nurine Syarafina Khawaja & Rachmad Kresna Sakti. (2018). "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan".
- Didu, Saharuddin & Ferri Fauzi. (2016). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak*. Vol. 6, No. 1.
- Elviera, Chyntia Dewi & Dedi Irawan. (2020). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Bisnis Net. Vol. 3, No. 2.
- Fadila, Radiatul., & Marwan. (2020). "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018". *Jurusan Pendidikan Ekonomi*. 3(1): 120-133.
- Fauzel, Sheereen., Boopen Seetanah., & Raja Vinesh Sannasse. (2016). *A Dynamic Investigation of Foreign Direct Investment and Poverty Reduction in Mauritius*. *Theoretical Economics Letters*, 6, 289-303. <http://dx.doi.org/10.4236/tel.2016.62033>
- Fithri, Naylal & David Kaluge. (2017). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 15, No 2.
- Istifaiyah, Lailatul. (2015). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan*.
- Ocaya, Bruno., Charles Ruranga., & William Kaberuka. (2012). *Dynamic Relationship Between Gross Domestic Product and Domestic Investment in Rwanda*. *World Journal of Education*. Vol. 2, No. 6. <http://dx.doi.org/10.5430/wje.v2n6p79>
- Palenewen, Themby O. M., Een N. Walewangko., & Jacline I. Sumual. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 18, No. 4.
- Pateda, Yolanda., Vecky A.J. Masinambouw., & Tri Oldy Rotinsulu. (2018). *Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo*.
- Pratama, N. R. N. S., & Made S. U. (2019). "Pengaruh Pengeluaran pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 8(7): 651-680.
- Ratih, Gusti. A. P. A., Made Suyana U., & I Nyoman M. Y. (2017). "Pengaruh Investasi, Pengeluaran pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 6(1):29-54.
- Rusdarti., & Lesta Karolina Sebayang. (2013). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Economia*. 9(1): 1-9. DOI: <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1371>
- Sackey, Prince Asare Vitenu & Richard Barfi. (2021). *The Impact of Covid-19 Pandemic on the Global Economy: Emphasis on Poverty Alleviation and Economic Growth*. *The Economics and Finance Letters*. Vol. 8, No. 1, pp. 32-43. DOI: [10.18488/journal.29.2021.81.32.43](https://doi.org/10.18488/journal.29.2021.81.32.43)
- Sourya K., Saykong S., dan Phanhpakit O., 2014, *Publik Spending, Aid Effectiveness and Poverty Reduction in Lao PDR, Laos*, *Journal of International Cooperation Studies*, Vol. 21, No. 2 & 3. www.translate.google.com

- Suharlina, Helly. (2020). "Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Sadono. 2000. Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tresya., Sahmin Noholo & Amir Arham. (2015). *Pengaruh Belanja Publik di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Inftrastruktur Terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo*.
- Wijayanto, Dian Daru & Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti. (2019). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Buruh di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Journal of Economics and Business. Indicators Vol. 1*.
- World Bank Institute. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.